

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pariwisata merupakan komponen penting yang berperan sebagai salah satu kunci sukses perekonomian dalam bidang jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia. Hal ini berkaitan dengan Sejarah Pembangunan global dimana pemerintah mengadopsi agenda Pembangunan berkelanjutan 2030 bersamaan dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam upaya mencapai SDGs dan *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) selaku organisasi pariwisata dunia berkomitmen untuk membuka ruang bagi seluruh pariwisata global untuk bersatu dan mewujudkan agenda 2030 tersebut. Pada tahun 2020, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi *Covid-19*. Kunjungan wisatawan internasional mengalami penurunan sebesar 73% yang berakibat pada penurunan kontribusi dari produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata sebesar US\$2.0 triliun (Asthu et al., 2023). *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) menyebutkan bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi terburuk sepanjang industri pariwisata dunia dimana PDB memiliki nilai yang sama seperti kondisi awal tahun 1990-an. Tiga tahun sejak pandemi *Covid-19*, industri pariwisata masih terus melakukan pemulihan. Pada triwulan I tahun 2023, UNWTO mencatat bahwa pergerakan wisatawan internasional mencapai 235 juta perjalanan atau mengalami kenaikan sebesar 86% (Asthu et al., 2023). Dalam masa pemulihan,

para wisatawan diperkirakan akan lebih memperhitungkan uang yang mereka belanjakan dan jarak tujuan destinasi yang memungkinkan mudah untuk dijangkau atau lebih dekat dengan domisili.

Pariwisata dikatakan sebagai sektor yang kompleks dan *fragmented* karena keberadaannya yang sulit untuk diukur akibat *trend* yang selalu berubah di setiap waktunya. Kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana pariwisata dapat diartikan sebagai beragam aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 8 disebutkan bahwa “pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk Pembangunan di berbagai tingkat meliputi rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan *International Union of Official Travel Organization* (IUOTO) dalam konferensi Roma tahun 1963, bahwa “*Tourism as a factor economic development role importance of international tourism was not importance as a source foreign exchange but also as a factor in the location of industry and in the development areas in the natural resources*” (Hakim, 2010). Pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal. Sektor pariwisata dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya melalui

*direct effect, indirect effect, induced effect* serta memberikan dampak *positive economies of scale* (Yakup & Haryanto, 2021). Pertama, pariwisata berperan penting sebagai penambah devisa negara yang kemudian digunakan untuk modal proses produksi berikutnya. Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam *Outlook* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023-2024, Bank Indonesia mencatat pendapatan devisa negara Indonesia dari sektor pariwisata mencapai US\$6,72 miliar di tahun 2022 (Asthu et al., 2023). Kajian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pulau Bali merupakan daerah wisata yang mampu menyumbang 50 persen dari target 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional (Hendriyani, 2024). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno memperkirakan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 633 hingga 703 juta dimana peningkatan devisa pariwisata Indonesia tak lepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara seiring menurunnya angka kasus pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, capaian nilai devisa pariwisata mencapai US\$ 14 miliar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat pendapatan devisa negara Indonesia hingga semester - 1 2023 dari sektor pariwisata mencapai angka US\$6,08 miliar atau naik sebesar 236,78% (Asthu et al., 2023).

**Tabel 1. 1 Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia (2014-2022)**

Tahun	Jumlah Devisa Pariwisata Indonesia ( Miliar USD)
2014	10,26
2015	10,76
2016	11,21
2017	13,14

Tahun	Jumlah Devisa Pariwisata Indonesia ( Miliar USD)
2018	16,43
2019	16,91
2020	3,38
2021	0,52
2022	6,72
2023	14,00
2024	16.71

Sumber : Portal Satu Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023

Pasca pemulihan pandemi Covid-19 terdapat kebijakan relaksasi pembatasan perjalanan wisatawan yang berpengaruh besar terhadap jumlah wisatawan di Indonesia. Adapun jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2022 mencapai 5,89 juta kunjungan. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara hingga bulan Juli 2023 mencapai 6,31 juta kunjungan atau naik sebesar 196,85% dimana penyumbang wisatawan terbanyak berasal dari Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok dan Timor Leste (Asthu et al., 2023). Relaksasi Pembatasan perjalanan wisatawan juga berlaku untuk wisatawan nusantara (wisnus), dimana jumlah wisatawan Nusantara pada semester 1 tahun 2023 mencapai 433,7 juta perjalanan atau naik sebesar 12,57% dari tahun 2022 (Asthu et al., 2023). Keberadaan sektor pariwisata juga berperan dalam menstimulus investasi di berbagai bidang seperti infrastruktur serta ikut dalam membuka lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2022, sektor pariwisata berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 22,89 juta orang pasca pandemi Covid-19 dimana jumlah tersebut bertambah 1,63 juta orang dibandingkan data di tahun 2021 yakni sebesar 21,26 juta orang (Asthu et al., 2023). Sedangkan di tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia terus memperluas penyerapan tenaga

kerja pada sektor pariwisata dengan estimasi sebesar 21,93 juta orang (Asthu et al., 2023). Seiring Penambahan jumlah tenaga kerja ini menjadi nilai positif bahwa sektor pariwisata memegang peran penting dan memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Pariwisata juga berkontribusi dalam memperkenalkan kebudayaan daerah serta menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat.

Pariwisata terbagi menjadi beberapa bentuk dan jenis salah satunya adalah wisata budaya. Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kebudayaan merupakan hal yang penting guna menjaga kelestarian jiwa kebudayaan dalam suatu negara atau daerah. Wisata budaya juga disebut sebagai *cultural tourism* atau *culture immersion* dimana kegiatan pariwisata jenis ini memanfaatkan kebudayaan sebagai objek yang dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *culture immersion* menempati posisi kedua sebagai trend pariwisata yang akan terus populer untuk beberapa tahun kedepan (Asthu et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh minat wisatawan terhadap pengalaman budaya lokal yang autentik semakin tinggi. Menurut pendapat Taylor, kebudayaan merupakan satu kesatuan yang mencakup keseluruhan keyakinan, pengetahuan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat serta semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat (Prayogi & Danial, 2016). Negara Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman. Diketahui dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau lebih tepatnya memiliki 1.340 suku yang tersebar dengan corak dan ciri khas

kebudayaan masing masing. Keragaman budaya daerah dipengaruhi oleh faktor wilayah atau geografis. Semakin luas wilayah dalam suatu daerah, maka perbedaan kebudayaan akan semakin kompleks atau beragam.

Keberhasilan penerapan pengelolaan wisata budaya di Indonesia dapat dilihat di Pulau Bali dan Kabupaten Banyuwangi. Secara historis dan geografis, Pulau Bali dijuluki sebagai “surga pariwisata” Indonesia karena kekayaan alam dan peninggalan budaya yang luar biasa. Secara garis besar, pengembangan pariwisata di Bali bertumpu pada potensi budaya lokal yang saling mempengaruhi wisata Bali lainnya. Kebudayaan Bali mencakup aspek-aspek seperti sistem mata pencaharian, sistem peralatan, sistem sosial kemasyarakatan, sistem ilmu pengetahuan, sistem agama, sistem kesenian dan bahasa (Suweta, 2020). Peninggalan budaya bercorak hindu yang masih sangat kental menumbuhkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat Bali untuk menjaga jati diri dan menampilkan ciri khas mereka di tengah perkembangan zaman. Destinasi wisata budaya populer di Bali antara lain pertunjukan Tari Kecak dan Tari Barong (Seni Tari), Pura Besakih, Tanah Lot dan Desa wisata Panglipuran. Pada tahun 2024 Bali meraih penghargaan dalam *DestinAsian Readers' Choice Awards* sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia (Hendriyani, 2024). Sementara itu, adapun Kabupaten Banyuwangi yang berupaya untuk mengembangkan pariwisata daerahnya dengan memanfaatkan digitalisasi melalui “*Festival of Things*” dimana semua kegiatan dapat diagendakan melalui program festival yang disebut dengan Banyuwangi Festival. Festival ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2012 yang terdiri dari berbagai acara budaya dan menjadi salah satu program unggulan yang telah dipromosikan hingga

mancanegara. Pada tahun 2020 total *event* yang diselenggarakan berjumlah 123 *event* dan 102 *event* di tahun 2021. Dalam program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mengemas berbagai kebudayaan lokal menjadi sebuah atraksi yang berhasil menarik minat wisatawan seperti Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) dan Gandrung Sewu. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dari terpilihnya Kabupaten Banyuwangi dalam penghargaan Travel Club Tourism Award (TCTA) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tahun 2013 (Harmawan et al., 2022) serta memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bahwa sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2018 sebesar 5,6% (Rahmawati, 2020). Kabupaten Banyuwangi juga memiliki progress peningkatan pendapatan perkapita tertinggi dibandingkan daerah-daerah sekaresidenan seperti Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Lamongan yakni dari Rp20,8 Juta pada tahun 2010 dan naik menjadi Rp58,08 Juta pada tahun 2023 (Budiono, 2024). Selain menawarkan keindahan alam yang luar biasa, kedua daerah tersebut juga mengajak wisatawan untuk merasakan kebudayaan lokal sekaligus memberikan edukasi kepada wisatawan yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Hal ini dapat digunakan sebagai momen konsolidasi budaya dimana kearifan lokal dapat terjaga dan penguatan seni budaya rakyat yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memiliki serangkaian hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi pariwisata. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa guna memupuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, perjalanan wisata domestik yang bertujuan ke Pulau Jawa mencapai 75,49% dari total perjalanan wisatawan domestik di Indonesia pada tahun 2022 dimana Jawa Timur merupakan provinsi tujuan utama (Timur, 2023). Banyak daerah di Jawa Timur yang berlomba-lomba untuk menggali potensi pariwisata daerahnya.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya. Kabupaten Ponorogo menggali potensi wisata dengan mencanangkan konsep wisata budaya dimana pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik dan nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagai aktualisasi kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan misi yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Ponorogo periode 2019 -2024 Sugiri Sancoko dalam *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati, yaitu mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog yang kemudian direformulasi menjadi mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya (Kabupaten Ponorogo, 2022). Selain itu, hal ini juga selaras dengan program pemerintah yang mulai mempromosikan daerah-daerah wisata baru yang banyak menawarkan pengalaman budaya yang unik dimana hal tersebut terbukti dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang mencari pengalaman yang otentik. Pada tahun 2022, Kabupaten Ponorogo mendapatkan predikat sebagai Kota Budaya dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022 berkat kontribusi dan dedikasi tinggi Kabupaten Ponorogo terhadap upaya pemajuan kebudayaan (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan meliputi program atau kebijakan yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penyelamatan serta publikasi. Pembangunan ini dilaksanakan guna menjaga dan meningkatkan popularitas kesenian tradisional sebagai ciri khas dari suatu daerah yang kemudian digunakan untuk tombak pembangunan serta membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan sebutan Kota Reyog. Reyog merupakan seni pertunjukkan khas dari Kabupaten Ponorogo yang ditarikan secara berkelompok. Kesenian ini ditunjukkan dalam arena terbuka dimana tokoh penari utama dalam kesenian ini adalah Singo Barong yang ditarikan lewat topeng raksasa berkepala singa dengan hiasan bulu merak, dengan berat mencapai 50-60 kg (Dewi, 2018). Dalam penyebutannya, kata Reyog atau Reog menjadi kesimpangsiuran dalam masyarakat. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Ponorogo, Arim

Kamandoko mengatakan ejaan yang benar untuk kesenian daerah khas Kabupaten Ponorogo adalah “REYOG”. Shodiq Pristiwanto, S.Sn selaku Wakil Ketua Yayasan Reyog Ponorogo juga mengungkapkan bahwa:

“Saat ini, tidak perlu mempermasalahkan mana yang benar atau yang salah terkait tulisan “Reog” atau “Reyog”. Keduanya memiliki alasan dan latar belakang yang kuat. Tapi sekali lagi, hal ini jangan dijadikan sebuah ukuran kebenaran. Karena berdasarkan data lama yang ditemukan dan penuturan sesepuh yang benar adalah ejaan Reyog,” (sumber : <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/shodiq-penulisan-reyog-atau-reog-bukan-masalah/> - diakses pada 15 Maret 2024).

Untuk memperjelas dan memperkuat kesalahpahaman tersebut, Yayasan Reyog Ponorogo atas kesepakatan dengan Pemerintah Daerah mengajukan surat hak cipta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengklarifikasi penamaan dan penyebutan kesenian tersebut. Reyog Ponorogo dipercaya sebagai salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan unsur-unsur yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Kata Reyog sendiri merupakan singkatan dari Rasa kidung, Ingwang atau Engwang, Suksma Adi luhung, Hyang Widhi, Olah Kridaning Gusti, Gelar Gulung Karsaning Sang Maha Kuasa (Dewi, 2018). Artinya, kesenian ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi melainkan nilai historis dan filosofis yang mendalam. Alhumami (2018) dalam (Zuriatina, 2020) mengatakan, Indonesia memiliki modal budaya yang kuat dan dapat dijadikan sebagai modal dasar percepatan pembangunan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Reyog Ponorogo telah mendapatkan perhatian yang luar biasa dari berbagai pihak. Dikemas melalui berbagai program dan kebijakan, Pemerintah Daerah berusaha untuk mengoptimalkan potensi kesenian Reyog

Ponorogo menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo. Kesenian Reyog Ponorogo memiliki banyak peminat baik dari wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan data dari sumber SADAP (Satu Data Ponorogo) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, jumlah wisatawan ke destinasi wisata Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 mencapai 589.268 ribu jiwa. Sedangkan jumlah wisatawan terhadap wisata budaya sendiri tercatat sejumlah 40.369 ribu jiwa dengan pengunjung terbanyak pada daya tarik wisata Festival Reyog Ponorogo.

**Tabel 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan (wisata budaya) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022**

No.	Daya Tarik Wisata	Jumlah Wisatawan
1.	Pentas Reyog Bulan Purnama	Tidak Terlaksana
2.	Pentas Teater	500
3.	Pentas Reyog Telaga Ngebel	5.725
4.	Pentas Wayang Akhir Bulan	Tidak Terlaksana
5.	Festival Reyog Ponorogo (Festival Reyog Mini & Festival Nasional Reyog Ponorogo)	34.144
	Jumlah	40.369

Sumber : Portal Satu Data Ponorogo Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, dikelola oleh penulis 2024.

Festival Nasional Reyog Ponorogo merupakan modifikasi dari kesenian reyog yang dikemas menjadi suatu *event* tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Kabupaten Ponorogo sejak tahun 1997 (Ponorogo Tourism, 2021). Pada tahun 2022, tercatat partisipan grup Reyog Nasional pada *event* Festival Nasional Reyog Ponorogo (FNRP) sejumlah 28 grup dan Festival Reog untuk kategori Reyog Mini sejumlah 32 grup. Sementara pada tahun 2023, partisipan grup Reyog Nasional pada *event* Festival Nasional Reyog Ponorogo (FNRP) berjumlah 29 grup dan Festival Reog untuk kategori Reyog Mini berjumlah 18 grup. Event yang telah dilaksanakan selama dua puluh tujuh tahun ini merupakan bentuk nyata dari

komitmen Pemerintah guna mengembangkan kesenian Reyog Ponorogo. Tak hanya dalam rangka melestarikan kebudayaan, kegiatan Festival Nasional Reyog Ponorogo juga memiliki tujuan penting untuk berkontribusi terhadap pariwisata daerah yakni mendongkrak perekonomian masyarakat lokal dan meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo.

Dalam proses pengembangan kesenian Reyog Ponorogo saat ini menunjukkan perkembangan positif namun juga mendapati sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran penting dalam menampung aspirasi dan kewenangannya dalam menentukan kebijakan sosial secara mikro maupun makro termasuk pengembangan kebudayaan reyog. Program wisata budaya Festival Nasional Reyog Ponorogo mendapatkan sejumlah kritik dari berbagai pihak seperti penonton, panitia dan beberapa seniman Reyog. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program dan pelayanan yang diberikan selama event berlangsung belum optimal di setiap tahunnya. Kualitas layanan *event* dapat dievaluasi secara objektif menggunakan survei pengunjung. Menurut Yang, Liu-Liu dan Lanasari (2013) dalam (Wibowo, 2014) menyebutkan bahwa kualitas sebuah *event* atau festival dapat dinilai dari empat dimensi, yaitu *Entertainment*, *Transportation*, *Information* dan *Environment*. Melalui penyebaran kuesioner, diperoleh sampel Tingkat kepuasan pengunjung Festival Nasional Reyog Ponorogo tahun 2023 dengan responen berjumlah 55 orang. Responden terdiri dari 81,8% warga asli Ponorogo dan 18,2% warga luar kota.

**Tabel 1. 3 Tingkat Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap Event Festival Nasional Reyog Ponorogo XXVIII 2023**

No.	Indikator	Sub-indikator	Tingkat Kepuasan (%)
1.	Entertainment	1. Prosedur pembelian tiket	92,8
		2. Manajemen tiket dan penonton	46,7
		3. Kinerja petugas selama event	49
		4. Penataan Venue	61,9
2.	Transportation	1. Kemudahan akses jalan menuju lokasi	89,1
		2. Pelayanan parkir	41,8
		3. Penentuan lokasi	98,2
3.	Information	1. <i>Branding event</i>	83,6
		2. Keefektifan jumlah petugas dengan pelayanan yang diberikan	56
4.	Environment	1. Kebersihan lingkungan di sekitar lokasi <i>event</i>	30,8
		2. Ketersediaan kamar kecil	14,5
		3. Prosedur pelayanan pintu masuk dan pintu keluar venue	63,7

Sumber : Penulis, 2023

Dari kuesioner tersebut diperoleh data bahwa permasalahan yang masih sering ditemui yaitu kurangnya kinerja staff *event*, manajemen tiket dan penonton, penataan parkir, kebersihan lingkungan *event* dan ketersediaan kamar kecil yang tidak memadai. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Anita Purnamasari selaku seniman reyog sekaligus penonton Festival Nasional Reyog Ponorogo tahun 2024, bahwa :

“Saya sempat nonton dan melihat banyak sekali orang yang berdiri meskipun sudah didalam venue. Mereka kesusahan mencari tempat duduk

karena jumlah tiket dan kursi penonton di dalam venue kadang tidak sesuai. Menurut saya itu sangat mengganggu penonton yang lain, mengingat jarak venue dengan kursi penonton itu sudah lumayan jauh, kalau ditambah banyak yang masih kebingungan mencari tempat duduk ya tidak kelihatan.”  
(Wawancara 23 Agustus 2024)

Selain itu, koordinasi antar penyelenggara dan panitia masih dirasa kurang optimal.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Anastasya Helmalia selaku salah satu panitia *event* atau *volunteer* Festival Nasional Reyog Ponorogo XXVIII tahun 2023 sebagai berikut :

“Ketika *event* FNRP kemarin, yang paling kurang itu koordinasi baik dari sesama *volunteer* maupun *volunterr* dengan dinas. Pelaksanaan evaluasi setelah berjalannya acara di setiap harinya juga kurang efektif. Evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing divisi dan ketua divisi yang nantinya akan menyampaikan ke pihak dinas pariwisata. Namun, permasalahan maupun keluhan yang ditampung di tiap divisi ternyata tidak disampaikan ke pihak dinas jadi percuma eval kalau setiap hari mengulangi kesalahan yang sama.”  
(Wawancara 20 Januari 2024)

Koordinasi yang baik antar pelaku sebuah *event* adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan suatu acara. Kinerja staff yang baik, kenyamanan penonton dan atraksi yang berkualitas dapat mempengaruhi jumlah peminat suatu *event*. Osborn dan Gaebler (1996:194) dalam (Maulidiah, 2015), tujuan penyelenggaraan pelayanan public oleh unsur pemerintah untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan warga agar dapat memperoleh pelayanan public yang memuaskan. Pada tahun 2024, Festival Nasional Reyog Ponorogo berhasil mengalami peningkatan jumlah penonton dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pasca Covid-19. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hasil pendapatan program Festival Nasional Reyog Ponorogo yang justru menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni hanya menyumbang Rp.35 Juta ke kas daerah. Kepala BPPKAD Ponorogo, Sumarno mengungkapkan bahwa :

"Hasil dari pagelaran Festival Nasional Reyog Ponorogo tahun 2024 yang masuk pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pajak tontonan. Ya memang tahun ini kita tidak bisa mengelola event ini sendiri mengingat anggaran yang dialokasikan dari APBD sangat minim." (Sumber : <https://radarmadiun.jawapos.com/ponorogo/804848246/festival-reog-grebeg-suro-tahun-lalu-pemkab-ponorogo-terima-pemasukan-rp-420-juta-tahun-ini-hanya-segini> - diakses pada tanggal 3 Agustus 2024)

Dalam upaya perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan kesenian Reyog, Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersinergi untuk mengajukan Reyog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu bahwa kesenian Reyog Ponorogo telah diklaim oleh negara lain yaitu Malaysia sejak tahun 2008 dan kembali ramai viral di sosial media pada tahun 2023 yang menyebabkan situasi di Kabupaten Ponorogo makin tidak kondusif dan menimbulkan kekecewaan masyarakat terutama di kalangan seniman Reyog Ponorogo.



**Gambar 1. 1 Aksi Demonstrasi Seniman Reyog di Alun-Alun Ponorogo**

Sumber : (Saichu, 2022)

Kekecewaan yang dialami oleh warga Ponorogo mulai memuncak ketika ratusan warga hingga seniman dari seluruh paguyuban Reyog di Ponorogo menggelar aksi demonstrasi dan orasi 50 reyog selama 3 hari berturut-turut di alun-alun Ponorogo

tepatnya di depan Gedung Pemkab Ponorogo. Aksi yang sama juga terjadi di beberapa daerah lain seperti Surabaya, Madiun, dan Wonogiri. Aksi tersebut dilakukan untuk menggugah masyarakat lain dan pemerintah agar lebih serius dalam memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia.

Fakta sebenarnya kesenian Reyog Ponorogo sampai ke negara Malaysia tak lepas dari banyaknya tenaga kerja asal Kabupaten Ponorogo yang merantau ke Malaysia dan negara-negara lainnya. Di sisi lain, isu adu klaim kesenian Reyog oleh negara Malaysia diungkap sebagai miskomunikasi. Wakil Duta Besar Malaysia di Jakarta, Adian Mohd Shaffieg menjelaskan bahwa Malaysia belum mendaftarkan Reyog Ponorogo maupun kesenian serupa yang diberi nama Barongan ke UNESCO. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendi selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bahwa :

“Untuk Reyog, negara Malaysia rencananya mau ajukan ke juga, namun mereka bukan mendaftarkan kesenian beratasnamakan Reyog Ponorogo, melainkan sebagai Barongan. Maka dari itu kita harus lebih dulu. Karena ini kan sudah menjadi budaya dan warisan kita,” (sumber : <https://travel.detik.com/travel-news/d-6408118/reog-ponorogo-diklaim-malaysia-pakar-itu-tidak-benar> - diakses pada 12 September 2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat 2 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa adanya persamaan dalam seni pertunjukkan tradisional di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, isu klaim budaya lokal tidak dapat dilakukan apabila tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kebudayaan Indonesia, mengungkapkan bahwa setiap negara masih bisa mengajukan sebuah budaya ke UNESCO apabila karya budaya tersebut sudah menyebar atau memiliki nilai universal (Saichu, 2022).

Pengusulan Kesenian Reyog Ponorogo ke ICH UNESCO sudah dilakukan sejak lama namun mengalami kegagalan dan harus tersingkir dengan memilih jamu sebagai prioritas pengusulan warisan budaya tak benda dalam daftar ICH UNESCO untuk periode tahun 2022 hingga 2023. Banyak masyarakat Indonesia terutama warga Kabupaten Ponorogo yang menaruh harapan agar perlindungan terhadap kesenian ini dapat diprioritaskan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat (1) bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Upaya perlindungan, pengembangan dan pengelolaan warisan budaya Indonesia merupakan tanggung jawab semua warga negara dan bangsa Indonesia, dimana hal ini juga berlaku untuk perlindungan terhadap Reyog Ponorogo. Isu klaim kepemilikan terhadap warisan budaya Indonesia yang tidak segera diselesaikan akan menimbulkan problematika seperti keaslian kebudayaan, masalah politik diplomasi dan hubungan luar negeri serta masalah hukum. Meskipun sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, masyarakat Ponorogo berharap bahwa pemerintah dapat mengusahakan Reyog Ponorogo untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Kesenian Reyog Ponorogo merupakan kesenian yang memiliki nilai universal dan dapat menjadi warisan budaya dunia. selain itu, fakta bahwa kondisi identitas budaya Indonesia mulai memudar terutama di kalangan kaum muda cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu upaya pemajuan kebudayaan menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan.

Hal ini sesuai dengan ungkapan salah satu sesepuh Reyog Ponorogo yang akrab dipanggil dengan sebutan Mbah Pur bahwa :

“Kita tak ingin reog diklaim negara lain termasuk Malaysia, Pak Nadiem yang bertanggung jawab, untuk segera mendaftarkan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke Unesco. Jangan sampai keduluan oleh negara lain. Kalau keduluan Malaysia atau negara lain tentu yang menyesal bukan warga Ponorogo tapi seluruh Indonesia. Ini waktu yang tepat mendaftarkan ke Unesco,” terangnya. (sumber : <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1923164714/malaysia-kembali-klaim-reog-ponorogo-ratusan-seniman-ponorogo-demo-di-alun-alun> - diakses pada 17 September 2023).

Keberadaan Reyog Ponorogo sebagai warisan budaya sekaligus potensi wisata daerah membutuhkan strategi penting agar tujuan pengembangan Reyog Ponorogo dapat tercapai. Pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa pihak guna menciptakan sinergi yang solid dan efektif. Dalam mendukung pemajuan kebudayaan Reyog sebagai upaya pembangunan pariwisata, pemerintah bekerja sama dengan akademisi yang berperan penting sebagai konseptor dalam mendukung adanya pengembangan dan pemajuan kebudayaan. Peran akademisi dalam pengembangan kebudayaan Reyog Ponorogo meliputi pembelajaran terbatas di lingkungan sekolah setingkat SMP, SMA/SMK di Ponorogo. Transmisi pengetahuan dan keterampilan tersebut dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler menggunakan modul bahan ajar. Namun hal ini mendapati sejumlah kendala seperti ketersediaan sumber daya manusia, peralatan yang kurang memadai, waktu ajar dan kepadatan kurikulum sekolah serta anggaran yang terbatas. Selain itu, hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2020) yang berjudul Pengembangan Video Animasi Budaya Reog Ponorogo sebagai Suplemen Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa Sekolah

Dasar bahwa kendala yang seringkali dihadapi adalah keterbatasan media pembelajaran sehingga menurunkan minat siswa dalam pembelajaran Budaya Reyog Ponorogo.

Selain itu, keterlibatan sektor bisnis juga memiliki peran penting dalam upaya pengembangan kesenian Reyog Ponorogo sebagai *enabler* yakni menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal untuk menciptakan nilai tambah pengembangan produk dan pemasaran barang jasa guna mendongkrak pariwisata daerah. Sektor bisnis meliputi pihak swasta utama yang berperan sebagai investor atau *sponsorship* dan pihak pendukung seperti kelompok-kelompok bisnis pendukung program kebudayaan Reyog seperti UMKM pengrajin seni dan souvenir. Dalam pengembangan kebudayaan Reyog di Kabupaten Ponorogo, peran sektor bisnis berkontribusi dalam mendukung terselenggarakannya *event* budaya Reyog melalui *sponsorship* baik dari *brand* besar maupun *brand* lokal. Potensi ekonomi dari adanya kegiatan tersebut diperoleh dari penjualan tiket, sektor UMKM, perdagangan serta pajak dan retribusi daerah. Namun, bantuan yang diberikan hanya berlangsung saat *event-event* tertentu. Sedangkan, peran sektor bisnis dalam program kesenian Reyog sebagai destinasi wisata berupa kerja sama kontrak belum terlihat akibat ketidakpastian pasar karena wisata budaya memiliki pasar yang sulit untuk diprediksi.

Sebutan Kabupaten Ponorogo sebagai Kota Reog merupakan langkah awal pemerintah agar Kabupaten Ponorogo dapat dikenal lebih mudah dengan menonjolkan potensi kebudayaan yang dimiliki. Membangun popularitas adalah salah satu kunci untuk membangun citra sebuah produk agar produk tersebut akan

unggul dan bertahan dalam persaingan. Kotler dan Keller dalam (Dewi, 2018) mengungkapkan bahwa, apabila sebuah produk sudah menjadi *brand*, maka konsumen akan loyal terhadap *brand* tersebut dan tidak keberatan membayar harga premium. Begitu pula pada sektor pariwisata, *branding* diperlukan pada lokasi geografis tertentu, seperti kota, negara, atau tempat lainnya terutama dalam konteks destinasi wisata karena secara komersial pemasaran destinasi wisata lebih mudah didefinisikan. Dalam hal ini, komunitas berperan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan Reyog dan menjadi tombak penting dalam industri pariwisata guna menarik wisatawan. Komunitas berperan dalam mendukung pengembangan produk dan pengalaman wisata untuk mempromosikan serta memberikan pengetahuan lokal bagi wisatawan yang ingin mencari pengalaman otentik. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pihak komunitas Reyog belum cukup optimal dalam mendukung program Reyog sebagai destinasi wisata di Kabupaten Ponorogo. Adapun permasalahan terkait hal tersebut yaitu kurangnya komunikasi dan transparansi antara komunitas dengan pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh salah anggota komunitas Reyog Yogyakarta, Adhira Adha sebagai berikut :

“Pemerintah Kabupaten Ponorogo kurang memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah lainnya terkait penyebaran dan pengelolaan komunitas Reyog. Komunitas Reyog di daerah lain banya yang belum mendapatkan perhatian dan dukungan sehingga kami bergerak secara *independent*. Ya ini jadi problem bagi kami karena komunitas pasti terkendala biaya, jadi kami harus mencari biaya sendiri. “ (wawancara 13 Juni 2024)

Selain itu, Kurangnya komunikasi juga menyebabkan kurangnya kesempatan kolaborasi komunitas dalam pengembangan kebudayaan sebagai destinasi wisata dan ketidaksesuaian antara kebutuhan komunitas dengan tujuan pembangunan

pariwisata. Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu penggiat seni Reyog Ponorogo, Wahyu Fajar sebagai berikut :

“Sebagai penggiat seni, menurut saya yang kurang itu dari job. Karena ga selalu ada. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata harus bisa membuat program yang terstruktur. Bisa berkaca dari Pariwisata Bali, biar banyak yang tertarik untuk datang ke Ponorogo.” (wawancara 10 Juni 2024)

Dengan kata lain, program wisata budaya Reyog masih belum variatif sehingga pengalaman wisata yang diberikan terlihat monoton dan mempengaruhi minat wisatawan. Berdasarkan data dari sumber SADAP (Satu Data Ponorogo), jumlah wisatawan terhadap daya tarik wisata Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan, program kesenian Reyog masih berada di peringkat kelima dengan selisih pengunjung yang cukup banyak dibandingkan wisata lain. Hal ini didukung oleh data capaian PAD Kabupaten Ponorogo dari sektor pariwisata pada pertengahan tahun 2023 mencapai 4,2 miliar dimana penyumbang PAD terbesar masih berasal dari retribusi wisata alam Telaga Ngebel (Informatika & Timur, 2023).

Peningkatan jumlah wisatawan merupakan tujuan utama dalam sistem kepariwisataan yang kemudian diharapkan dapat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Dalam hal ini, media memiliki peran penting sebagai *publisher* untuk mempromosikan dan penyebaran informasi. Media dapat memberikan dorongan positif terhadap inisiatif pariwisata berkelanjutan dengan menciptakan kesadaran akan berbagai daya tarik destinasi. Citra positif dapat meningkatkan daya tarik destinasi dan jumlah kunjungan wisatawan (Sitanggang et al., 2020). Upaya publikasi informasi guna mempromosikan kesenian Reyog Ponorogo selama ini didukung oleh media resmi pemerintah, media nasional dan media lokal meliputi media digital, media cetak serta strategi promosi lainnya.

Namun, peran media terhadap pengembangan kesenian Reyog Ponorogo memiliki kekurangan diantaranya masih terbatasnya eksposur, dukungan liputan yang tidak konsisten serta minimnya konten digital yang menarik dan informatif mengenai Reyog Ponorogo. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya berita – berita yang memuat tentang kesenian Reyog Ponorogo dan mayoritas berita hanya meliput acara besar saja. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyo et al., 2024) yang berjudul Marketing Public Relations Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Pasca Pandemi Covid 19 terdapat temuan bahwa responsivitas sosial media dari pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan wisatawan masih terlihat kurang karena respon dari konsumen jarang ditanggapi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan peningkatan penggunaan sosial media. Oleh karena itu, interaksi dalam penggunaan media sosial adalah hal yang harus diperhatikan untuk membangun hubungan yang kuat antara wisatawan dan pelaku pariwisata sehingga tercipta kepercayaan dan loyalitas yang tinggi (Setyo et al., 2024)

Berbagai tantangan seperti homogenisasi budaya, urbanisasi, dan modernisasi dapat mengancam eksistensi keragaman budaya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tata kelola yang baik dalam pengelolaan budaya adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa warisan budaya suatu daerah dapat dilestarikan, dipromosikan dan dikelola secara berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kebudayaan dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk mengamati suatu permasalahan dari berbagai perspektif atau aspek yang berbeda serta sebagai

hubungan yang saling menguntungkan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, lembaga publik dapat secara langsung terlibat atau berkolaborasi dengan stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik, mengelola kebijakan program dan mengelola suatu asset (Harmawan et al., 2022). Konsep ini disebut juga dengan pemerintahan kolaboratif, dimana masing-masing komponen memperkuat satu sama lain untuk meningkatkan kualitas kolaborasi. Jika ditarik ke dalam paradigma administrasi publik, kolaborasi dalam pengembangan budaya berkaitan erat dengan konsep *Governance*. Dua pendekatan tersebut berbagi fokus akan terciptanya tata kelola publik yang berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kolaborasi antar *stakeholder* dalam upaya pengembangan kebudayaan lokal dimana sasaran pada konteks ini adalah kesenian Reyog Ponorogo. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori *Pentahelix*. Menurut Herdiansyah (2020) dalam (Hoerniasih et al., 2023:41) *pentahelix* adalah prinsip kerjasama kemitraan yang dibentuk oleh berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan yang memiliki latar belakang yang beragam. Teori ini merupakan pengembangan dari model *triple helix* dan *quadruple helix* guna menciptakan ekosistem yang kreatif dan inovatif yang pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Teori ini terdiri dari lima unsur yang disebut sebagai

penentu kesuksesan pariwisata melalui optimalisasi peran ABCGM yakni Academician, Business, Community, Government, Media (Septadiani et al., 2022). Lima unsur tersebut harus kompak, saling support dan membangun iklim pariwisata yang kondusif. Teori ini membantu dalam pengembangan program kebudayaan agar lebih terstruktur hingga proses evaluasi untuk mencapai tujuan yang optimal dan dapat berdampak pada upaya pariwisata berkelanjutan. Hal ini juga relevan dengan adanya kewajiban pemerintah dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengelolaan kebudayaan telah menjadi agenda kenegaraan guna mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari permasalahan terkait program pelestarian kesenian Reyog di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kolaborasi Pentahelix Pengembangan Kebudayaan Lokal Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk kepada hal-hal yang sudah terdapat pada latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, sehingga peneliti merumuskan masalahnya dalam kegiatan penelitian ini adalah bagaimana Kolaborasi Pentahelix Pengembangan Kebudayaan Lokal Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada pula tujuan atas penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Kolaborasi Pentahelix Pengembangan Kebudayaan Lokal Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat terhadap berbagai pihak, baik dari peneliti maupun dari pihak lain khususnya dalam lingkup akademis maupun masyarakat umum dalam memahami bagaimana Kolaborasi Pentahelix Pengembangan Kebudayaan Lokal Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari segi teoritis bagi pihak yang bersangkutan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan menjadi sebuah ruang wawasan yang baru terkait Kolaborasi Pentahelix Pengembangan Kebudayaan Lokal Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo dan sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana pada program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

##### **b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Untuk menjadi**

bahan referensi tambahan maupun bahan bacaan bagi perpustakaan. Maka, kajian riset ini bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan riset di masa yang akan datang terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- c. Bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Dapat memberikan masukan maupun pemikiran yang baru dan menjadi saran terhadap keluaran kebijakan dan nantinya bisa juga dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan khususnya dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo yang berorientasi pada kebudayaan lokal Reyog Ponorogo menggunakan model Kolaborasi Pentahelix.